



Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2016

Open Government Indonesia

*Indonesia Midterm Self-Assessment Report of
The 4th National Action Plan 2016-2017*

Daftar Isi

A.	Pendahuluan	4
B.	Dinamika Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	7
B.1	Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Tahapan Penyusunan Rencana Aksi	8
B.2	Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Implementasi, Monitoring dan Evaluasi	9
B.3	Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Siklus Open Government Partnership	10
C.	Rekomendasi Independent Reporting Mechanism 2014-2015	11
C.1	Rekomendasi terkait Penguatan Kelembagaan Sekretariat Nasional OGI	12
C.2	Rekomendasi terkait Pengurangan Kuantitas Rencana Aksi dengan Substansi yang Lebih Ambisius	13
C.3	Rekomendasi terkait Partisipasi Publik dalam Pemantauan Perkembangan Setiap Komitmen Rencana Aksi, Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Evaluasi	13
C.4	Rekomendasi terkait Wilayah Kebijakan yang Menjadi Prioritas Pemangku Kepentingan untuk Menjadi Pertimbangan Tema Rencana Aksi 2016-2017	13

Daftar Isi

D.	Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	15
D.1	Pencapaian Renaksi di Tingkat Nasional	17
D.2	Pencapaian Renaksi di Tingkat Sub Nasional	21
E.	Komitmen Unggulan 2016	26
E.1	Rencana Aksi Daerah: Bojonegoro, Banda Aceh, Bandung, DKI Jakarta & Semarang	27
E.2	Peningkatan Kualitas Inisiatif Satu Data Indonesia dan Transparansi APBN	28
E.3	Perluasan Replikasi Inisiatif LAPOR!	29
E.4	Mendorong Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik	30
E.5	Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik	31
F.	Penutup	32



A.

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidaklah mudah. Salah satu upaya dan metode yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan pemerintah yang terbuka. Pemerintah yang terbuka akan mendorong keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam proses pembangunan nasional. Pada akhirnya, konsolidasi dari berbagai aktor pembangunan akan memperbesar peluang ketercapaian target-target pembangunan.

Sejak keterlibatan Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) di tahun 2012, Indonesia sudah memasuki siklus Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi) keempat. Dalam Rencana Aksi 2016-2017, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) menjangkau 5 (lima) pemerintah daerah untuk terlibat di dalam Renaksi dengan tujuan memperluas semangat keterbukaan. Lima pemerintah daerah yang tergabung yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Bandung.

Dalam proses penyusunannya, terdapat empat pilar yang menjadi pondasi keterbukaan pemerintah yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi. Untuk itu, lima pilar prioritas Renaksi 2016-2017 adalah: (1) penyusunan *grand strategy* pemerintah terbuka, (2) peningkatan partisipasi publik, (3) perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik (4) penguatan keterbukaan informasi publik; serta (5) pembenahan tata kelola data.

Dari kelima prioritas tersebut, terdapat total 50 komitmen dari 17 kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) yang terlibat di dalamnya. Meskipun dari segi kuantitas Renaksi 2016-2017 menurun, namun dari segi kualitas dapat dikategorikan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian di tahun 2016 yang naik sebesar 22% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga dipengaruhi karena proses penyusunan Renaksi yang jauh lebih partisipatif dengan pelibatan *multi-stakeholder* dalam ruang diskusi substantif.

Dengan adanya pencapaian ini, maka dapat disimpulkan bahwa fase keterbukaan pemerintah Indonesia terus mengalami kemajuan. Perlahan namun pasti ruang dialog pemerintah dan masyarakat dalam



Tidak hanya Pemerintah Pusat, di tahun 2016 OGI juga melibatkan

Pemerintahan Daerah untuk memperluas semangat keterbukaan

proses pembuatan kebijakan publik pun semakin luas. Melihat potensi ini, maka kedepannya akan terus diupayakan praktik pelibatan seluruh stakeholder secara aktif dalam tiap tahapan Renaksi demi menciptakan keterbukaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



... di tahun 2016,
pencapaian
Renaksi
meningkat 22%
dibandingkan
tahun sebelumnya.





B

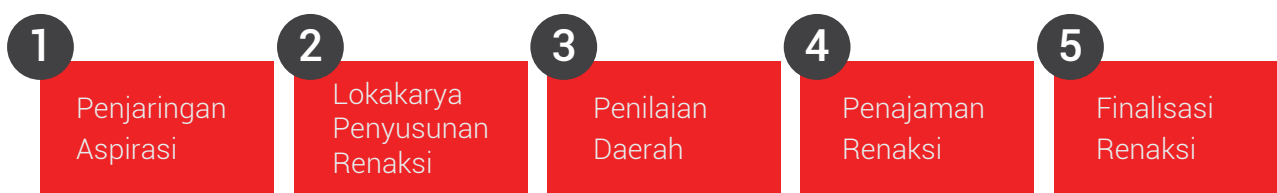
DINAMIKA RENCANA AKSI
OPEN GOVERNMENT INDONESIA
2016-2017



B. Dinamika Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016- 2017

Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 diluncurkan pada Desember 2016 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tim penyusun terdiri atas beberapa unsur, baik dari k/l seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, maupun perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Proses penyusunan Renaksi OGI di siklus keempat ini, secara aktif melibatkan publik di tiap tahap penyusunannya. Bahkan bukan hanya menerapkan metode konvensional melalui diskusi/tatap muka, proses pelibatan publik di tahun ini juga dilakukan melalui sarana *online*. Secara garis besar pada periode 2016-2017 ini, Renaksi dibuat dalam lima tahapan yaitu: (1) penjaringan aspirasi, (2) lokakarya penyusunan Renaksi, (3) penilaian daerah, (4) penajaman; dan (5) finalisasi. Keseluruhan proses ini menerapkan prinsip partisipasi dan ko-kreasi. Berikut penggambaran proses penyusunan Renaksi OGI 2016-2017.



Tabel 1: Proses Penyusunan Renaksi OGI 2016-2017

B.1. Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Tahapan Penyusunan Rencana Aksi

B.1.1 Tahap Penjaringan Aspirasi

Tahap penjaringan aspirasi menggunakan metode survei *online* melalui ragam aset digital yang dimiliki seperti situs, *Facebook* dan *Twitter*. Survei *online* ditujukan untuk menjangkau pendapat publik mengenai tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di 7 (tujuh) sektor pemerintahan yang sudah disepakati oleh tim penyusun, yaitu (i) pelayanan publik, (ii) penegakan hukum, (iii) transparansi anggaran, (iv) lingkungan hidup dan sumber daya alam, (v) keterbukaan parlemen, (vi) pembangunan desa, dan (vii) tata kelola data.

Survei yang dilaksanakan selama dua minggu tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 316 responden dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat terjaring dengan baik. Hasil dari penjaringan aspirasi publik ini kemudian dirumuskan menjadi isu-isu prioritas dalam Renaksi.

B.1.2 Tahap Lokakarya Penyusunan Renaksi

Tahap lokakarya penyusunan Renaksi mempertemukan k/l yang potensial untuk terlibat dalam Renaksi OGI dengan masyarakat sipil. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas

isu, tantangan kunci, serta solusi alternatif di 7 (tujuh) sektor yang sudah disepakati sebelumnya.

B.1.3 Tahap Penilaian Daerah

Terkait konteks daerah, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil mengunjungi beberapa kandidat pemerintah daerah. Pada tahapan pertama, Seknas OGI bersama masyarakat sipil menilai kesiapan beberapa daerah melalui *desk review*. Setelah itu, kedua elemen bertemu untuk mempertajam daftar daerah potensial agar dapat dinilai secara langsung. Dalam kunjungan daerah, Seknas OGI dan masyarakat sipil memvalidasi temuan dan kesiapan pemerintah daerah melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan aparatur daerah setempat.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian daerah adalah: (1) komitmen kepala daerah, (2) keberadaan *local champions*, (3) kesiapan kanal dan regulasi keterbukaan, dan (4) ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil. Berdasarkan penilaian inilah maka Seknas OGI bersama koalisi masyarakat sipil memutuskan bahwa DKI Jakarta, Bojonegoro, Semarang, Bandung dan Banda Aceh adalah daerah yang tepat untuk terlibat dalam Renaksi 2016-2017.

B.1.4 Tahap Penajaman Renaksi

Pada tahap penajaman Renaksi, dilaksanakan dua metode, diskusi bilateral dan multilateral. Metode ini dipilih untuk memastikan setiap komitmen yang menjadi rencana aksi adalah sesuatu yang fundamental bagi tercapainya prioritas nasional. Selain itu, diskusi penajaman juga berguna untuk memastikan setiap rencana aksi masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan/atau teranggarkan oleh instansi penanggung jawab terkait.

B.1.5 Tahap Finalisasi Renaksi

Pada tahap finalisasi, Seknas OGI mempraktikkan ko-kreasi dengan pelibatan seluruh koalisi masyarakat sipil, k/L, beserta pemda yang terlibat dalam komitmen Renaksi untuk duduk bersama dan menyepakati bersama poin-poin Renaksi dalam bentuk dokumen resmi. Pada fase inilah Seknas OGI berhasil menetapkan pada periode 2016-2017 terdapat 50 Renaksi dari 17 k/L dan pemda.

B.2. Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Implementasi, Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan adanya partisipasi dan ko-kreasi dalam proses implementasi, monitoring dan evaluasi Renaksi, Seknas OGI turut melibatkan masyarakat sipil dalam proses pendampingan pencapaian Renaksi. Salah satu contoh bentuk konkret adalah pendampingan oleh MediaLink dan PATTIRO kepada Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Renaksi terkait pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan responsif. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hambatan dan sekaligus solusi alternatif agar pada periode akhir pelaksanaan Renaksi, k/L dan pemda mampu mencapai target capaian.

B.3. Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Implementasi, Monitoring dan Evaluasi

Setidaknya terdapat 3 (tiga) praktik partisipasi dan ko-kreasi dalam siklus OGP yaitu: (1) diseminasi informasi, (2) pelibatan publik melalui forum dialog dan ko-kreasi, dan (3) kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama. Dalam aspek diseminasi informasi, Seknas OGI sudah memiliki situs resmi yang mudah diakses, menyimpan seluruh data terkait kinerja Seknas OGI seperti: rencana aksi tiap dua tahunan, laporan pelaksanaan rencana aksi tahunan – *Government Self-Assessment Report (GSAR)*, laporan evaluator independen terhadap pencapaian rencana aksi – *Independent Reporting Mechanism (IRM)*, dan data-data terkait implementasi keterbukaan. Selain itu, dalam situs juga sudah terdapat *point of contact* yang menyertakan alamat serta nomor telepon Seknas OGI yang dapat dihubungi.

Kemudian dalam aspek pelibatan publik melalui forum dialog dan ko-kreasi, Seknas OGI juga selalu membuka praktik pelibatan publik, termasuk masyarakat sipil, pada tiap tahapan penyusunan Renaksi. Seknas OGI juga selalu terbuka dengan berbagai masukan dari publik melalui penyediaan kolom komentar di situs dan jejaring media sosial OGI. Selanjutnya, dalam aspek kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama, Seknas OGI juga memberikan ruang partisipasi yang sama besarnya bagi unsur publik dan pemerintah dalam seluruh tahapan Renaksi. Baik pada tahapan penyusunan hingga implementasi dan monitoring dan evaluasi.



Seknas OGI juga memberikan ruang partisipasi yang **sama besarnya** bagi unsur publik dan pemerintah ...





C

REKOMENDASI INDEPENDENT REPORTING MECHANISM

▪ 2014-2015

C. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism 2014-2015

Rencana Aksi 2016-2017 disusun dengan mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya adalah rekomendasi dari IRM 2014-2015 yang dikeluarkan oleh tim evaluator independen OGP. Berikut adalah penjelasan terkait empat rekomendasi utama dalam IRM yang dijadikan masukan dalam Renaksi OGI 2016-2017:

C.1. Rekomendasi terkait Penguatan Kelembagaan Sekretariat Nasional OGI

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut dapat dilihat melalui terbitnya Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.51/M.PPN/HK.08/2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia) yang melandasi keberadaan Sekretariat Nasional. Putusan ini merupakan regulasi lanjutan dari Peraturan Presiden No. 13/2014 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership. Berikut secara singkat penggambaran kelembagaan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.



Bagan 1 Organogram Tim Inti Sekretariat Nasional OGI

Selain itu, untuk memperkuat regulasi tersebut, Bappenas melalui Seknas OGI juga menargetkan penyelesaian rencana strategis dan peta jalan atau *road map* keterbukaan pemerintah sebagai salah satu target capaian yang harus diselesaikan pada Renaksi 2016-2017.

C.2. Rekomendasi terkait Pengurangan Kuantitas Rencana Aksi dengan Substansi yang Lebih Ambisius.

Tindak lanjut dari hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Renaksi yang berkurang pada periode ini, di mana sebelumnya terdapat 52 komitmen (Renaksi 2014-2015) dan sekarang hanya terdapat 50 komitmen (Renaksi 2016-2017). Selain pengurangan kuantitas, Renaksi yang ambisius juga dapat dilihat dari komitmen yang terdapat dalam Renaksi pada periode ini, antara lain: (1) Renaksi daerah yang secara spesifik mendorong keterbukaan di 5 (lima) daerah percontohan dengan berbasiskan pada permasalahan yang terdapat pada daerah masing-masing, (2) Peningkatan kualitas inisiatif satu data yang tidak hanya menitikberatkan pada keterhubungan k/l dan pemda, namun juga memastikan bahwa data yang terkumpul adalah yang berkualitas dan dapat dibagipakaikan. (3) Transparansi APBN melalui situs Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi pembelanjaan negara setiap tahunnya, hingga (4) Pemanfaatan informasi pada situs Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah juga harus dapat mendorong pemanfaatan informasi yang sudah disajikan kepada publik, tidak hanya sebatas menyajikannya.

C.3. Rekomendasi terkait Partisipasi Publik dalam Pemantauan Perkembangan Setiap Komitmen Rencana Aksi, Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Evaluasi.

Praktik tindak lanjut dari rekomendasi ini dapat dilihat dari situs OGI yang mempublikasikan tiap tahapan pembuatan Renaksi kepada publik (<http://opengovindonesia.org/front/currentRenaksi>). Selain itu, di tiap tahapan pembuatan Renaksi, Seknas OGI juga memastikan pemberian ruang penyampaian aspirasi melalui kolom komentar yang terdapat di akhir artikel. Seknas OGI membuka ruang partisipasi di dalam tiap tahapan penyusunan hingga monitoring dan evaluasi kepada publik bukan hanya untuk menjalankan rekomendasi IRM, namun juga untuk memastikan bahwa seluruh praktik yang dilakukan oleh Seknas OGI partisipatif secara substansial, sehingga mampu membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

C.4. Rekomendasi terkait Wilayah Kebijakan yang Menjadi Prioritas Pemangku Kepentingan untuk Menjadi Pertimbangan Tema Rencana Aksi 2016/2017.

Dalam rekomendasi IRM, wilayah kebijakan yang disarankan untuk dijadikan agenda utama dalam Renaksi 2016-2017 antara lain mencakup: kebijakan satu peta, transparansi pengadaan barang dan jasa, transparansi fiskal, pelaksanaan Undang-Undang Desa, pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan perlindungan data pribadi. Wilayah kebijakan tersebut

sedikit banyak sudah terangkum di dalam beberapa tema rencana aksi yang diangkat, baik pada tingkat nasional maupun sub nasional, seperti transparansi pengadaan barang dan jasa serta kebijakan satu peta. Di samping rekomendasi yang didapat dari IRM, tema Renaksi 2016-2017 juga dipilih berdasarkan aspirasi dari banyak pemangku kepentingan. Sehingga tidak semua rekomendasi wilayah kebijakan yang disajikan dapat terangkum dalam Renaksi periode ini. Misalnya, terdapat pilar strategi tata kelola data yang menjadi salah satu tema prioritas Renaksi walaupun tidak dimuat dalam rekomendasi, namun dinilai perlu dan penting untuk dijalankan dalam Renaksi 2016-2017.



Selain rekomendasi IRM, tema Renaksi 2016-2017 juga dipilih berdasarkan **aspirasi dari banyak pemangku kepentingan....**



#JadiOpen

Focus Group Discussion

Perumusan Peta Jalan Pemerintah Terbuk

Open Government Indonesia

Disampaikan oleh : Direktur Aparatur Negara
Deputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 21 Juni 2017



D

IMPLEMENTASI KOMITMEN
RENCANA AKSI OPEN
GOVERNMENT INDONESIA

2016-2017

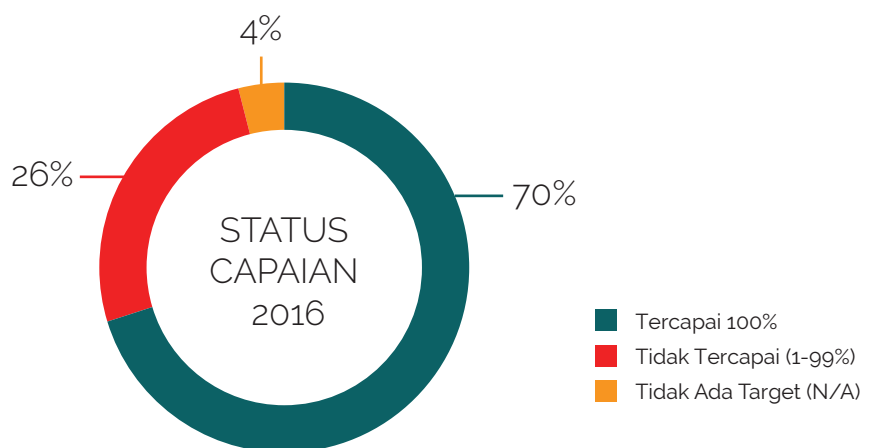
D. Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Dalam kurun waktu implementasi yang kurang dari satu tahun, secara umum tingkat capaian Renaksi pada paruh putaran keempat (*4th NAP cycle*) mengalami peningkatan, walaupun terjadi sedikit penurunan pada jumlah Renaksi dan keterlibatan k/l seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah KLD	14	13	24	21	17
Renaksi	38	21	64	52	50
Capaian 100%	76.6	85.7	54.7	48	70

Tabel 2 Perbandingan Tingkat Ketercapaian Renaksi OGI Periode 2012 - 2016

Dari 50 komitmen dari 17 k/l dan pemda yang dirangkum dan dijabarkan dalam Renaksi 2016, sebanyak 35 komitmen (70%) berhasil mencapai target akhir capaian, 13 komitmen (26%) sudah mulai dijalankan namun belum mencapai target akhir capaian, dan sebanyak 2 komitmen (4%) yang ditargetkan untuk diselesaikan di tahun 2017 dikategorikan sebagai tidak memiliki target akhir capaian. Adapun gambaran atas capaian Renaksi 2016 dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1 Capaian Renaksi OGI 2016

Dari sisi proporsi level pelaksanaan, substansi Renaksi 2016 terlihat cukup berimbang dalam pembagian jumlah komitmen di tingkat nasional dan sub nasional. Pejabat kementerian dan lembaga berpartisipasi dalam penyusunan dan implementasi sebanyak 21 komitmen di

tingkat nasional. Sedangkan, di tingkat sub nasional (daerah) terdapat sebanyak 27 komitmen yang dirancang dan diimplementasikan di 5 (lima) pemerintah daerah berdasarkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Untuk dapat mengevaluasi secara mendalam terkait capaian Renaksi di tahun 2016, maka penjabaran pencapaian, faktor pendukung dan penghambat pada tingkat nasional dan daerah akan dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:

D.1. Pencapaian Renaksi di Tingkat Nasional

Terdapat total 21 komitmen Renaksi 2016 di tingkat nasional. Dari Renaksi ini, 11 komitmen sudah tercapai, sedangkan 10 komitmen belum tercapai. Tabel berikut memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen Renaksi 2016 di tingkat nasional tersebut.

Tabel 3 Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2016 di Tingkat Nasional

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
Capai (11 Komitmen)		
<i>Grand Strategy</i> Pemerintah Terbuka	Tersusunnya Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
Peningkatan Partisipasi Publik	Meningkatnya partisipasi publik di dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial	Badan Informasi Geospasial (BIG)
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Meningkatkan keterhubungan lebih banyak BUMN ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (LAPOR!)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya Sistem Aplikasi LAPOR! menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
Capai (11 Komitmen)		
	Meningkatnya kapasitas pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI	Sekretariat Jendral Ombudsman Republik Indonesia
	Meningkatnya kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Agama	Kementerian Agama
	Meningkatnya kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kredibilitas Ombudsman RI sebagai otoritas nasional pemantau kualitas pelayanan publik	Sekretariat Jendral Ombudsman Republik Indonesia
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran	Kementerian Keuangan
	Terwujudnya keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tidak/Belum Capai (10 Komitmen)		
Peningkatan Partisipasi Publik	Tersusunnya imbauan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan konsultasi publik secara rutin di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan sebagai realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Tersusunnya panduan tata kelola yang baik (<i>manual governance</i>) dan pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai upaya mewujudkan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang lebih partisipatif	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Meningkatnya sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via LAPOR! menjadi 1 juta aduan untuk 2016	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
Tidak/Belum Capai (10 Komitmen)		
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Terjalannya kerjasama antara KemenPANRB, KSP, ORI, dan Kominfo untuk menafaatkan LAPOR!-SP4N sebagai wadah aspirasi dan apresiasi publik <i>online</i>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Terbentuknya penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Terbentuknya penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui <i>public awareness campaign</i> tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan.	Kementerian Kesehatan
	Terbentuknya penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui <i>public awareness campaign</i> tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tata Kelola Data	Terbentuknya penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah	Kantor Staf Presiden

Beberapa faktor pendukung capaian komitmen rencana aksi di tingkat nasional diantaranya:

1. Komitmen dari Pejabat Struktural maupun Pelaksana Teknis.

Hal ini dapat dilihat dari rencana aksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang mencanangkan peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU.No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Adanya komitmen dari pejabat struktural di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung tercapainya perbaikan di 3 (tiga) layanan pendidikan sesuai dengan rekomendasi Ombudsman RI yaitu; standar pelayanan

penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), sertifikasi guru, dan izin pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan PAUD. Berangkat dari diterapkannya tiga rekomendasi ini, baik pengakses maupun pemberi layanan dapat saling mengetahui alur dengan jelas. Mulai dari *standard operational procedure* (SOP), hingga hal spesifik seperti; biaya, waktu dan mekanisme pengaduan.

Hal serupa juga terjadi pada Kementerian Agama, di mana usulan perbaikan untuk 9 (sembilan) produk layanan administrasi secara keseluruhan ditindaklanjuti dengan baik. Sembilan produk tersebut antara lain; (i) permohonan izin penyelenggara perjalanan ibadah haji, (ii) permohonan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah, (iii) legalisasi buku nikah, (iv) legalisasi surat keterangan belum menikah, (v) pelayanan rekomendasi kartu izin menetap, (vi) pelayanan rekomendasi kartu izin tinggal terbatas, (vii) pelayanan pembuatan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing bidang agama, (viii) visa tinggal terbatas dan (ix) rekomendasi visa tinggal kunjungan sosial budaya. Dengan adanya komitmen dari jajaran pejabat struktural dan teknis dalam pelaksanaan Renaksi, target menjadi lebih mudah tercapai. Dengan demikian, masyarakat pun dapat secara langsung merasakan manfaatnya.

2. Keselarasan Rencana Aksi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada beberapa Renaksi, salah satunya yang dilaksanakan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan sistem aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), berkaitan erat dengan kegiatan prioritas pelayanan publik yang tercantum dalam RKP. Hal ini mendukung pencapaian komitmen rencana aksi dikarenakan adanya sinergi dan komitmen pelaksanaan baik dari segi substansi maupun dari sisi anggaran. Contoh lain juga dapat dilihat dari Renaksi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhasil menghubungkan LAPOR! dengan 118 BUMN yang dikelolanya. Ini juga dikarenakan konektivitas dengan LAPOR! menjadi salah satu program prioritas dalam rencana kerja Kementerian BUMN.

3. Keterlibatan Pejabat Penanggung Jawab Rencana Aksi dari Tahap Perencanaan sampai Pelaksanaan Membantu Mengawal dan Memastikan Ketercapaian Komitmen.

Dalam proses pembuatan Renaksi, secara umum terdapat banyak pejabat penanggung jawab Renaksi yang terlibat di tiap tahapan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan komitmen, pejabat penanggung jawab penting untuk turut mengawal serta memastikan ketercapaian komitmen. Salah satu contohnya terdapat dalam pelaksanaan Renaksi meningkatkan keterhubungan LAPOR! ke instansi dalam BUMN. Kolaborasi dari tiap instansi yang ada dalam internal Kementerian BUMN serta Kementerian BUMN dengan

kementerian lain yang dinisiasi oleh pejabat penanggung jawab Renaksi, mendukung pencapaian ini dengan maksimal.

Di sisi lain, beberapa hal yang terindikasi menjadi tantangan dalam pencapaian komitmen Renaksi di tingkat nasional di antaranya:

1. Diferensiasi Tingkat Komitmen di Internal Maupun antar Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Meskipun pada beberapa k/l tingkat komitmen untuk melaksanakan Renaksi sudah merata di tiap tingkatan pejabat publik, namun di beberapa k/l lain pelaksanaan komitmen Renaksi masih sangat bergantung pada figur *reformers*. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang menjadi penghambat ketercapaian Renaksi di tingkat nasional.

2. Ketiadaan *Baseline Data*: Tidak Semua Renaksi Dilengkapi Data Dasar dan Data Dukung yang Spesifik.

Dalam beberapa komitmen Renaksi, tidak terdapat data dasar/*baseline* dan data dukung yang secara spesifik dapat dijadikan indikator untuk mengukur capaian Renaksi. Salah satu contohnya adalah Renaksi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam aspek penguatan keterbukaan informasi publik yang menargetkan peningkatan jumlah pengunjung situs Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengunjung per Desember 2015. Hasil pencapaian tidak dapat diverifikasi karena belum tersedianya basis pengukuran data per akhir 2015, baik untuk pengunjung situs, maupun jumlah pengikut media sosial milik Kemenristekdikti.

D.2. Pencapaian Renaksi di Tingkat Sub Nasional

Terdapat total 27 Renaksi di tingkat sub-nasional dengan rincian 24 komitmen tercapai dan 3 lainnya tidak tercapai. Secara garis besar, komitmen Renaksi 2016 di level sub-nasional tercapai untuk keempat pilar strategis: (1) penguatan keterbukaan informasi publik, (2) peningkatan partisipasi publik, (3) perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan pelayanan publik, (4) tata kelola data. Tiga dari lima pemerintah daerah bahkan mampu memenuhi komitmen 100% yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun capaian ini didukung dari tingginya komitmen pejabat pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pemerintah terbuka. Tabel berikut memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen Renaksi 2016 di tingkat sub-nasional (pemerintah daerah).

Tabel 4 Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2016 di Tingkat Sub Nasional

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
Capai (24 Komitmen)		
Peningkatan Partisipasi Publik	Terwujudnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan Pemkot Semarang	Pemerintah Kota Semarang
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan	Pemerintah Kota Bandung
	Terwujudnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Terwujudnya penguatan akuntabilitas pemerintah desa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terwujudnya penguatan aplikasi LAPOR!	Pemerintah Kota Bandung
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya peningkatan publikasi informasi oleh DPRD mengenai informasi kelembagaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD	Pemerintah Kota Semarang
	Meningkatnya keterbukaan informasi usulan-usulan masyarakat kepada anggota DPRD dari hasil reses	Pemerintah Kota Bandung
	Terlaksananya pengelolaan data terbuka	Pemerintah Kota Banda Aceh
	Terwujudnya penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Terwujudnya penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terwujudnya penguatan keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan di Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung
	Terwujudnya penguatan keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kota Semarang
	Meningkatnya jumlah data terbuka	Pemerintah Kota Bandung

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
Capai (24 Komitmen)		
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya pemanfaatan informasi publik melalui optimalisasi portal.jakarta.go.id	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Meningkatnya pemanfaatan informasi publik melalui strategi komunikasi yang optimal	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Meningkatnya transparansi anggaran daerah	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Meningkatnya transparansi sistem anggaran daerah	Pemerintah Kota Bandung
	Terlaksananya revolusi data	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Tata Kelola Data	Terwujudnya pembangunan satu basis data Pemkot Semarang yang up-to-date, terintegrasi, dan akurat	Pemerintah Kota Semarang
	Terwujudnya penguatan tata kelola data	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Meningkatnya tata kelola data dan informasi di bawah kewenangan DPRD	Pemerintah Kota Semarang
	Tersusunnya regulasi terkait tata kelola data Pemkot Semarang yang sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia	Pemerintah Kota Semarang
Tidak/Belum Capai (3 Komitmen)		
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Terwujudnya penguatan kanal pengaduan	Pemerintah Kota Banda Aceh
	Terwujudnya penguatan pelayanan publik	Pemerintah Kota Bandung
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi <i>Gampong</i> (Desa)	Pemerintah Kota Banda Aceh

Beberapa faktor pendukung pencapaian komitmen rencana aksi di tingkat sub-nasional di antaranya:

1. Komitmen Pimpinan Daerah dan Dukungan Pejabat Pelaksana.

Salah satu faktor yang menjadi kunci kesuksesan dari Renaksi di tingkat sub nasional ialah komitmen tinggi dari pimpinan daerah. Pada Kabupaten Bojonegoro misalnya, Bupati

memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan keterbukaan. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan bukan hanya untuk mendukung pencapaian Renaksi, namun juga untuk mendorong keterbukaan secara nyata di daerah untuk memperkecil celah korupsi.

2. Kesesuaian Rencana Aksi Daerah dengan Program Nasional.

Faktor lain yang menjadi pendukung ketercapaian Renaksi daerah ialah ketika program daerah tersebut sejalan dengan agenda nasional. Hal ini terlihat pada Renaksi Pemerintah Kota Semarang yang mendorong perbaikan tata kelola data, dan dalam waktu bersamaan pemerintah pusat juga sedang mendorong agenda Satu Data Indonesia. Keterhubungan antara kebutuhan daerah dan agenda nasional ini secara tidak langsung mendorong ketercapaian Renaksi di daerah terkait

3. Kuatnya Koordinasi Antara Dinas dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian Renaksi daerah. Sebagai contoh dalam menyusun dan menjalankan komitmen Renaksi, Pemerintah Kota Bandung melibatkan sejumlah dinas dan inspektorat, mulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) hingga Inspektorat kota Bandung. Partisipasi dan kolaborasi ini menjadikan Pemerintah Kota Bandung mampu menjalankan komitmen Renaksi yang terkait dengan perbaikan pelayanan publik dan keterbukaan anggaran.

4. Meningkatnya Kebutuhan Masyarakat akan Keterbukaan Informasi.

Substansi Renaksi yang berasal dari masukan dan kebutuhan masyarakat mampu menggerakkan dan mengarahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga komitmen yang disusun dan dijalankan dalam Renaksi menjadi konkret dan tepat guna. Sebagai contoh, terlaksananya pengembangan situs PPID provinsi sebagai salah satu elemen keberhasilan komitmen akan penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik, hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi.

Di sisi lain, beberapa hal yang terindikasi menjadi tantangan dalam pencapaian komitmen Renaksi di tingkat sub nasional di antaranya:

1. Keterbatasan Komunikasi dengan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Proses Penyusunan Rencana Aksi.

Keterlibatan pemerintah daerah di dalam Rencana Aksi OGI merupakan kali pertama sejak Renaksi OGI pertama kali digulirkan di tahun 2012. Dikarenakan keterbatasan waktu dan

interaksi dengan aparaturnya membuat proses penajaman aksi menjadi suboptimal. Alhasil bisa dikatakan sebagian Rencana Aksi Daerah kurang spesifik dan terukur. Tidak semuanya memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Answerable, Relevant and Time-bound* (SMART) yang telah dirumuskan OGP

2. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempengaruhi secara cukup signifikan terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa pemerintah daerah membawa dampak secara merata terhadap kualitas pencapaian Rencana Aksi daerah untuk periode pelaporan akhir tahun 2016 (B12). Hal yang sama setidaknya masih juga dirasakan sampai dengan pemantauan triwulan kedua Renaksi di tahun 2017 (B06).

3. Transisi Kepemimpinan Kepala Daerah.

Proses transisi kepemimpinan di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 ini juga secara tidak langsung membuat perkembangan capaian Renaksi terhambat. Hal ini dikarenakan periode persiapan pemilu yang juga turut membagi fokus pimpinan terhadap prioritas capaian Renaksi. Faktor yang sama diantisipasi akan terjadi juga di Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi DKI Jakarta ketika petahana menyelesaikan masa tugas mereka tahun 2017 ini.



Komitmen

pimpinan serta kolaborasi aktif dengan tim pelaksana jadi salah satu kunci kesuksesan Renaksi...





E.

KOMITMEN UNGGULAN 2016

E. Komitmen Unggulan 2016

Komitmen unggulan adalah komitmen dalam Rencana Aksi yang apabila berhasil dicapai akan memberikan dampak yang luas bagi pencapaian visi keterbukaan pemerintah. Dalam menentukan komitmen unggulan ini, Open Government Indonesia juga mengacu pada prinsip SMART yang sudah disepakati bersama melalui OGP sebagai acuan utama dalam pembuatan keseluruhan Renaksi. Berikut penjelasan beberapa Renaksi yang tergolong dalam komitmen unggulan 2016.

E.1. Rencana Aksi Daerah: Bojonegoro, Banda Aceh, Bandung, DKI Jakarta & Semarang

Untuk memastikan bahwa praktik keterbukaan pemerintah mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan pendekatan yang holistik dengan komitmen yang tinggi dari lapisan penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat salah satunya pemerintah daerah. Berangkat atas dorongan inilah maka pada tahun 2016, Open Government Indonesia mengembangkan rencana aksi daerah dengan mengawali proyek percontohan di 5 (lima) daerah yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Semarang dan Provinsi DKI Jakarta. Terdapat tiga basis utama dalam proses pemilihan kelima daerah tersebut yaitu: (1) komitmen pimpinan beserta jajaran, (2) infrastruktur regulasi yang memadai, dan (3) ketersediaan ruang kolaborasi dengan masyarakat. Harapannya, dengan keberhasilan kelima proyek percontohan ini, proses replikasi keterbukaan di daerah lain akan terakselerasi.

Berkaca pada pengalaman Kabupaten Bojonegoro, dari 5 (lima) Renaksi keterbukaan yang telah dicapai, terdapat satu Renaksi yang cukup inovatif dan berdampak luas yaitu penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa atau yang dikenal dengan *Open Data Contract*. Pada Renaksi ini, Bojonegoro telah berhasil membangun pondasi regulasi serta prototipe aplikasi yang nantinya akan dijadikan *platform* terlaksananya praktik *Open Data Contract*. Pada tahun 2017 diharapkan praktik *Open Data Contract* sudah bisa diaplikasikan dan dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan di Kota Banda Aceh, komitmen untuk membangun portal data terpadu telah tercapai dengan mengintegrasikan seluruh data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Portal Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id). Dengan begitu proses pengambilan kebijakan yang tepat sasaran bagi pemerintah serta kemudahan mengakses data bagi masyarakat dapat terealisasi.

Selanjutnya pada Kota Bandung, dari 8 (delapan) Rencana Aksi prioritas, salah satu yang cukup berdampak luas dan vital untuk terus dikembangkan adalah transparansi sistem anggaran daerah yang berfokus pada dua area yaitu transparansi anggaran seluruh SKPD melalui situs PPID Kota Bandung (ppid.bandung.go.id) serta terpublikasikannya dana hibah sosial melalui aplikasi Sabilulungan (sabilulungan.bandung.go.id).

Di Provinsi DKI Jakarta, salah satu dari 6 (enam) Renaksi yang cukup berdampak dalam mendorong partisipasi publik secara luas adalah Renaksi yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik Renaksi tersebut diukur melalui terlaksananya proses rembuk RW secara *online*, tersedianya kanal usulan dalam aplikasi E-Musrenbang dan terpublikasinya hasil perencanaan pada fase RKPD, KUA-PPAS, penyampaian KUA-PPAS, RAPBD dan APBD pada sistem e-Budgeting (apbd.jakarta.go.id). Dengan terbangunnya sistem dan pengaplikasian yang substantif dari Renaksi ini, ruang publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah dapat terfasilitasi dan hasil kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran.

Kemudian pada Kota Semarang, dari total 6 (enam) Renaksi di tahun 2016, salah satu yang memberikan dampak besar bagi keberlanjutan praktik keterbukaan informasi publik adalah Renaksi yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait tata kelola data yang sejalan dengan Satu Data Indonesia. Kedepannya, regulasi yang menjadi tonggak awal komitmen keterbukaan Pemerintah Kota Semarang ini akan menjadi basis penerapan kewajiban transparansi serta standardisasi data di Kota Semarang. Dengan adanya praktik tersebut, baik masyarakat maupun pemerintah akan semakin mudah untuk mengakses data yang akurat.

Menyadari dan merasakan manfaat dari kehadiran Renaksi daerah, maka pada Renaksi Open Government Indonesia 2018-2019 praktik ini akan terus diperluas. Terlebih lagi dalam mengeksplorasi keterbukaan satuan pemerintah yang lebih kecil dari daerah yaitu desa.

E.2. Peningkatan Kualitas Inisiatif Satu Data Indonesia dan Transparansi APBN

Satu Data Indonesia adalah inisiatif yang sebelumnya dikenal dengan nama Open Data Indonesia yang diluncurkan pertama kali di tahun 2014. Sejak awal pendiriannya, perluasan inisiatif Satu Data Indonesia terus dilakukan di berbagai tingkatan pemerintah. Tujuan pengembangan Inisiatif Satu Data Indonesia adalah untuk melakukan pembenahan atas tata kelola data pemerintah Indonesia. Satu Data Indonesia mendorong agar data tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, sekaligus sebagai basis perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang efisien dan tepat sasaran.

Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2016, inisiatif Satu Data Indonesia lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses bisnis penyelenggaraan data pemerintah. Secara konkret, hal ini dituangkan di dalam prakarsa penyusunan Peraturan Presiden terkait Satu Data Indonesia yang dimulai sejak bulan Mei 2016. Ada tiga prinsip utama yang didorong melalui rancangan Peraturan Presiden ini, yaitu: (1) Terdapat satu standar data yang mengatur keseluruhan metodologi data, (2) Terdapat satu metadata baku yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga mudah untuk dikelola kembali, dan (3) Terdapat interoperabilitas data yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar pemangku kepentingan. Perubahan arah kebijakan dalam inisiatif satu data ini membuat penambahan

jumlah instansi maupun jumlah dataset yang tergabung dalam Satu Data Indonesia tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 hanya terdapat penambahan 5 instansi (total 36 instansi) bila dibandingkan dengan tahun 2015 (total 31 instansi). Adapun 36 instansi yang tergabung dalam inisiatif Satu Data Indonesia adalah: 16 kementerian, 11 lembaga/badan, 4 pemerintah daerah (Kabupaten Bojonegoro, Provinsi DKI Jakarta, Kota Pontianak, Kota Bandung), 1 BUMN (PT.KAI), 4 instansi/organisasi/sumber data lainnya: EITI, LAPOR!, Indonesia COFIS dan Indodapoer.

Selain inisiatif Satu Data Indonesia, terdapat satu komitmen unggulan dalam aspek transparansi pemerintah yaitu portal data anggaran (data-apbn.kemenkeu.go.id). Melalui portal ini, publik dapat mengakses informasi seputar anggaran pembelanjaan negara secara terbuka. Selain untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tujuan dari pembuatan portal data anggaran ini ialah juga untuk memberikan kemudahan bagi publik untuk menggunakan data seputar APBN.

Mengingat pentingnya pengembangan aspek transparansi berbagai data pemerintah ke publik, maka pada tahun-tahun mendatang proses peningkatan kualitas dan kuantitas inisiatif Satu Data Indonesia serta berbagai portal keterbukaan pemerintah akan terus dikembangkan.

E.3. Perluasan Replikasi Inisiatif LAPOR!

Membuka ruang partisipasi publik yang sistematis, transparan dengan tindak lanjut yang konkret merupakan salah satu wujud nyata keterbukaan pemerintah. Untuk itu, pengembangan aplikasi LAPOR! terus dilakukan sejak peluncurannya di tahun 2011.

Mampu mengatasi hambatan pada tahun sebelumnya, di tahun 2016, Rencana Aksi Open Government Indonesia berhasil mendorong penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian PANRB, dan Ombudsman RI sebagai tiga instansi penjuror yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengembangan LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N) yang sebelumnya tertunda. Pencapaian ini dinilai sangat positif karena dapat mengakselerasi proses replikasi LAPOR! di berbagai instansi pemerintah sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Meskipun tidak 100% berhasil mencapai target Renaksi 2016, LAPOR! terus mengalami peningkatan dalam beberapa aspek yaitu: total pengguna aplikasi mencapai 523,088 orang dan total laporan pengaduan mencapai 989,287 dengan 50% dari total aduan berhasil ditindaklanjuti. Bahkan pada tahun ini, LAPOR! juga sudah terintegrasi dengan seluruh BUMN yang ada di Indonesia dengan total 118 instansi. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah memulai proses integrasi sistem pengaduan mereka dengan LAPOR-SP4N melalui Renaksi di tahun ini. Harapannya keterpaduan seluruh kanal pengaduan di lingkungan KLHK akan tercapai di akhir tahun 2017.

Proses replikasi dan implementasi LAPOR! akan terus dikembangkan di berbagai instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah melalui Renaksi Open Government Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hal ini dikarenakan ketersediaan sebuah wadah partisipasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

E.4. Mendorong Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu prinsip keterbukaan pemerintah adalah partisipasi publik. Harapannya, setelah dilaksanakan praktik keterbukaan, pemerintah juga bisa mendapatkan aspirasi yang membangun dari masyarakat. Dengan begitu skema *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka pada Renaksi 2016, beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta Provinsi DKI Jakarta, ditargetkan mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan keterbukaan informasi publik yang telah disediakan.

Melalui Renaksi ini setidaknya instansi-instansi pemerintah tersebut diharapkan memiliki arsitektur atau strategi komunikasi yang bisa memastikan pesan utama yang dibangun di tiap instansi dapat tersampaikan dengan baik ke publik. Selain itu, beberapa target seperti peningkatan jumlah pengikut di akun media sosial, peningkatan total unduh informasi publik serta jumlah kunjungan ke situs instansi juga dilekatkan pada instansi-instansi tersebut sebagai salah satu tolak ukur partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa contoh dapat dilihat pada Renaksi Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenristekdikti yang menargetkan peningkatan jumlah pengikut media sosial, jumlah pengakses situs serta total unduh informasi publik dengan persentase yang telah disesuaikan. Selain itu, melalui Renaksi ini Kemenkes dan Kemenristekdikti juga ditargetkan memiliki arsitektur komunikasi digital untuk mengatur kanal informasi yang dimiliki, mengingat dua kementerian ini memiliki banyak aset digital yang dapat diakses oleh publik.

Sedikit berbeda dengan Renaksi Kementerian, melalui Renaksi yang terkait dengan pemanfaatan informasi publik oleh masyarakat, Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk dapat menyediakan rancangan strategi komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI Jakarta dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan. Dengan menyadari bahwa pemanfaatan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu agenda prioritas, maka proses pengembangan aspek ini dalam beberapa Renaksi mendatang akan terus dilakukan.

E.5. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan cerminan nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apabila pelayanan publik berjalan dengan baik, maka dapat disimpulkan pula bahwa pemerintah mampu menjamin hak masyarakatnya dengan baik, dan begitu pula sebaliknya. Menyadari akan hal tersebut, Open Government Indonesia berinisiasi mendorong pelaksanaan kepatuhan atas rekomendasi Ombudsman RI terkait pelayanan publik, bagi dua Kementerian yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kedua kementerian ini dipilih karena dinilai memiliki tugas dan fungsi layanan yang dekat dengan masyarakat, namun masih memiliki beberapa catatan pelayanan publik yang perlu diperbaiki.

Secara khusus rekomendasi diberikan pada produk layanan utama kedua kementerian tersebut. Harapannya, dengan adanya perbaikan atas sistem dalam produk layanan publik dapat merasakan manfaat nyata. Sebagai contoh, pada rekomendasi tentang produk layanan standar izin pendirian satuan pendidikan kerjasama dan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didorong untuk merumuskan standar pelayanan perizinan tersebut. Beberapa hal yang harus dicantumkan antara lain: alur layanan, kejelasan waktu dan biaya layanan serta mekanisme pengaduan. Latar belakangnya sederhana, yaitu agar aktor non-pemerintah yang ingin menyelenggarakan pendidikan, dapat mengetahui secara jelas mekanisme permohonan perizinan. Dengan demikian, peluang praktik pungutan liar dapat diminimalisasi dan pelayanan publik pun dapat menjadi jauh lebih optimal. Selain itu, efek jangka panjang lain yang diharapkan adalah terciptanya penyelenggaraan pendidikan berkualitas karena proses standardisasi dan verifikasi perizinan telah berjalan sesuai ketentuan.

Contoh lain terdapat pada Kementerian Agama. Dengan adanya kemudahan mengakses perizinan penyelenggaraan perjalanan umrah dan haji, maka pemerintah secara tidak langsung hadir untuk menjamin hak-hak masyarakat saat melaksanakan ibadah. Perbaikan yang dilakukan pada sistem dan tata laksana pelayanan publik ini, boleh jadi tidak dirasakan serta-merta manfaatnya oleh masyarakat hari ini. Namun apabila penerapannya dikawal dengan baik, maka pelayanan publik berkualitas yang berkelanjutan dapat terus terjaga. Ini dikarenakan proses perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga pondasi membangun pelayanan yang kuat dapat terbentuk.

ITU KOTAMU MENJADI LEBIH BAIK

LAPOR HENDI

@HendrarPriha

IM SMS KE 1708 :
ORHENDI (SPASI ADUAN)



MELALUI TWITTER
#LAPORHENDI

WWW.LAPOR.GO.ID

UAR. MER. EKA



F.

PENUTUP

F. PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi 2016-2017 merupakan fase yang cukup menantang karena pada periode ini, Renaksi partisipatif OGI pertama kali dirumuskan secara langsung oleh Seknas OGI, paska berpindah pengelolaan dari UKP4 ke Kementerian PPN/Bappenas. Bahkan jangkauan Renaksi pun pada periode ini telah diperluas, tidak hanya melibatkan pemerintah pusat saja namun juga lima pemerintah daerah. Belajar dari pengalaman yang sudah didapatkan pada tahun ini, berikut secara garis besar pembelajaran dan rekomendasi Renaksi pada periode mendatang.

Tiga pembelajaran dari implementasi Renaksi 2016 antara lain:

1. Ketercapaian Renaksi masih sangat bergantung pada figur dan komitmen dari *reformers* di k/l dan pemda. Ketika figur tersebut tidak lagi menjabat, segala perubahan positif lambat laun juga terkikis. Hal ini dikarenakan jajaran pemerintah di tingkat nasional maupun sub nasional masih melihat Renaksi sebagai sebuah instruksi bukan kebutuhan instansi, sehingga tidak ada rasa kepemilikan ataupun inisiatif untuk mempertahankan berjalannya Renaksi apabila pimpinan sudah tidak lagi menjabat.
2. Pentingnya merumuskan aksi yang memenuhi kriteria SMART yang dilengkapi data dasar dan data dukung yang terukur. Dengan begitu, proses verifikasi data saat fase pelaporan Renaksi menjadi lebih mudah. Baik pihak k/l dan pemda maupun Seknas OGI dapat mengetahui status capaian Renaksi, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan dengan jelas dan mempermudah proses perumusan Renaksi di tahun mendatang.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyusunan Renaksi 2016-2017 adalah proses yang paling partisipatif bila dibandingkan dengan Renaksi-renaksi sebelumnya. Dalam proses pembuatan Renaksi periode ini, dibutuhkan tenaga besar dan waktu yang cukup panjang dengan dialog yang intensif. Meskipun demikian, proses pembuatan Renaksi dengan metode partisipatif dirasakan sebagai pendekatan yang paling baik karena dengan proses dialog yang panjang. Selain itu, k/l dan pemda yang terlibat turut merasa memiliki keharusan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, metode partisipatif ini harus terus dikembangkan agar Renaksi OGI terus menghasilkan target yang tepat guna dan sasaran.

Dari tiga poin pembelajaran tersebut, dapat dirumuskan tiga rekomendasi langkah strategis bagi Tim Seknas Open Government Indonesia ke depan:

1. Membangun sistem dan konsistensi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil secara struktural dan institusional terhadap agenda keterbukaan sangat penting demi terwujudnya perubahan nyata. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan struktur ataupun fungsi dari para *reformers*, praktik keterbukaan dapat terus dijalankan. Selain itu, apabila keterbukaan telah tersistematisasi dengan baik, maka praktik keterbukaan tidak akan lagi dilihat sebagai sebuah keharusan namun sebuah kebutuhan.
2. Untuk memastikan seluruh komitmen dalam Renaksi dapat berjalan dengan maksimal, maka Renaksi harus mampu secara konsisten menerapkan prinsip SMART. Dengan SMART, baik Seknas OGI maupun k/l dan pemda terkait dapat menghasilkan Renaksi yang berdampak dan terukur, sehingga progres dan capaian Renaksi di tiap tahapan dapat lebih mudah teridentifikasi.
3. Mengingat bahwa metode perumusan Renaksi partisipatif adalah metode terbaik sejauh ini, maka praktik eksplorasi metode partisipatif lainnya menjadi penting untuk terus dilakukan. Metode partisipatif sendiri penting untuk dibangun tidak hanya dengan publik, namun juga secara intens dengan k/l dan pemda yang terlibat dalam Renaksi. Harapannya, dengan tersedianya ruang komunikasi yang nyaman dan bermanfaat bagi kemajuan instansi terkait, maka seluruh *stakeholder* akan lebih terdorong untuk berkolaborasi secara maksimal dalam proses perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi Renaksi